

SKRIPSI
“PRILAKU POLITIK ELIT MUHAMMADIYAH DALAM
PILKADA NTB 2018”
(Studi Kasus PWM NTB)

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (

S1) pada program Studi: Studi Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

(KONSENTRASI ILMU POLITIK)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2018/2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERILAKU POLITIK ELIT MUHAMMADIYAH DALAM PILKADA NTB 2018

(Studi Kasus PWM NTB)



Disusun dan diajukan oleh:

SAMSUL HADI
NIM.21513A0063

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II


Dedv Iswanto ST.MT
NIDN. 0818087901


Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mataram, 20 Agustus 2019

Mengetahui.

Ketua Program Studi

Studi Pemerintahan


Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PERNGESAHAN

SKRIPSI

PERILAKU POLITIK ELIT MUHAMMADIYAH DALAM PILKADA NTB 2018

(Studi Kasus PWM NTB)



Disusun dan diajukan oleh

SAMSUL HADI
NIM.21513A0063

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah di pertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: **Agustus 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

- | | | |
|--|------------|---------|
| 1. Dedy Iswanto ST.MT
NIDN. 0818087901 | Ketua | (.....) |
| 2. Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902 | Anggota 1 | (.....) |
| 3. Hidayatulah S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902 | Anggota II | (.....) |

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Samsul Hadi

NIM : 21513A0063

Dengan ini sayang menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan/atau Doktor baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun perguruan tinggi lainnya)
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram,.... Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
0C3D0AFF78529015
6000
ENAM RIBURUPIAH

Samsul Hadi

NIM 21513A0063

MOTO

The Dead Let Them Die, But Don't Make Your Death Pointless
(Yang Mati Biarlah Mati, Tapi Jangan Jadikan Kematianmu Sia – Sia)



PERSEMBAHAN

“Sekripsi ini saya persembahkan untuk Kerja keras kedua orang tua saya yang telah menghibahkan seluruh jiwa dan raganya untuk membesarkan putra dan putrinya sehingga tumbuh besar menjadi insan yang bisa berpikir dan berbakti ke orang tuanya”

Dan

Untuk seluruh Keluarga besar yang membantu dari awal hingga saat ini semoga amal ibadahnya di terima oleh allah dan senantiasa di curahkan rahmat, hidaya dan taufiq nya oleh Allah S.W.T

Amin... Amin... Amin..

Ya Rabbal Alamin



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'amin. Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya lah yang senantiasa tercurah kepada penulis sehigga penyusunan Skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk meyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana program studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Studi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tersusunya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karna itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak DRS H. Arsyad Ghani M. Pd, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak DRS. H. M. Junaidi, MM. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
3. Bapak Ayatulah Hadi S.IP M.IP selaku Ketua Prodi Studi pemerintahan Dan juga sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing ke II penulis
4. Bapak Dedy Iswanto ST.MT Selaku Dosen pembimbing Utama
5. Bapak Ayatulah Hadi S.IP M.IP Selaku Dosen Pembimbing ke II
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ibu Masitah yang mana telah bekerja keras berjuang serta memberi doa tulus, dan bapak Haji Husni bin Abdurahim yang senantiasa membanting tulang serta bercucuran keringat dalam mencari Nafkah serta biaya untuk melanjutkan pendidikan ,dan memberikan dukungan nasehat yang bermanfaat sehingga dari lahir Sampai perkuliahan dan penyusunan Proposal ini dapat terlaksana dengan baik hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya.
7. Terimakasih untuk Kak Khusnul Hidayat S.Pd dan Kak Idha Asmara S.E yang telah memberikan Tumpangan dan membantu baik secara moral amupun materil sehingga saya bisa menyelsaikan Skripsi Ini.
8. Terimaksi juga buat Adek perempuan ku Hartina Dan Rovina yang selalu sabar menghadapi kakak rasa Adek ini.

9. Terimaaksi juga Buat pujaan hati Mirna (unga) yang slalu Setia menemani ketika mengerjakan Proposal ini.
10. Untuk Lara Aulia adek yang Bawel dan Selalu memotivasi kakak mu ini trimaksi banyak atas waktunya menjadi tempat berbagi
11. Trimaksi juga buat Keluarga Besar Formasi Pakar para Seseput, Tokoh yang ada di dalam nya, Terus berkarya Dan Saling Ikat karna (*Ite Pade Besemetom*)
12. Untuk segenap keluarga Besar H. Husni Dan Ibu Masitah yag tidak bisa penulis sebutkan Satu persatu Orang nya. Tapi semoga kita smeua dalam keadaan Sehat dan sukses. Amin

Penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran terhadap Skrips ini agar dikemudian hari penulis dapat membuat tulisan-tulisan yang lebih baik. Kiranya isi proposal ini bermanfaat bagi pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi penulisan selanjutnya yang berminat menulis hal yang sama.

Mataram , Agustus 2019

SAMSUL HADI

21513A0063

ABSTRAK

Oleh :

Nama : Samsul HADI

Nim: 21513A0063

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Prilaku elite politik Muhammadiyah Ssebagai elite agama di NTB dan faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan elite muhammadiyah dalam pilkada NTB tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Pengurus Wilayah Muhammadiyah NTB dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penulis menyajikan data dalam bentuk deskripsi berupa teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat dan gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengurus wilayah muhammadiyah NTB menentukan Pilihnya pada Saat Pilkada NTB 2018 Berdasarkan dari bebrapa aspek, antara lain kepentingan yang sama berupa Visi Misi, program pasangan calon Gubernur NTB, Kesamaan Ideologi juga menjadi salah satu faktor para elite Muhammdiyah dalam menentukan Pilihanya Seperti kesaman Agama karna ini di sebabpkan oleh organisasi muhammadiyah adalah organisasi Islam. dan Faktor ekonomi untuk kesahjraan masarakat NTB yang sesuai dengan cita cita Muhammadiyah. Adapun aspek yang tidak di gunakan dalam Menentukan Pilihan oleh elite muhammadiyah adalah tidak mementingkan golongnya sendiri atau sesama kader perserikatan karna elite muhmmadiyah lebih mementingkan Figur yang tepatat untuk Memimpin NTB.

Kata Kunci : Prilaku, Politik, Elite



ABSTRAK

Oleh :

Nama : Samsul HADI

Nim: 21513A0063

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the behavior of the political elite of Muhammadiyah As a religious elite in NTB and what factors influenced the choice of the elite of Muhammadiyah in the NTB elections in 2018. This research was carried out in the Muhammadiyah Regional Administrators in NTB using qualitative descriptive analysis methods. The author presents the data in the form of descriptions in the form of narrative texts, words, expressions, opinions and ideas collected by researchers from various sources. The results of this study indicate that the administrator of the NTB Muhammadiyah region determines his election during the 2018 NTB regional elections based on several aspects, including the same interests in the form of vision and mission, the program of the pair of candidates for the Governor of NTB, Ideology Similarity is also one of the factors of the Muhammadiyah elite in determining his choice Religion because this religion is caused by the Muhammadiyah organization is an Islamic organization. and Economic factors for the happiness of the people of NTB in accordance with the ideals of Muhammadiyah. The aspects that are not used in determining choices by the Muhammadiyah elite are not concerned with their own group or fellow union cadres because the Muhammadiyah elite is more concerned with the right figure to lead NTB.

Keywords: Behavior, Politics, Elite

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka	8
2.1.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Definisi Prilaku	28
2.3. Teori Elit	29
2.4. Rational Choice	31

2.4.1. Asumsi Dasar Teori Rational Choice.....	32
2.4.2. Konsef Rational Choice.....	37
2.5. Konsef Civil Society	39
2.6. Krangka Pikir.....	41
2.7. Definisi Konseftual.....	43
2.8. Definisi Oprasional.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	45
3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian	45
3.3 Sumber Data	46
3.4 Responden Penelitan.....	47
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Tehknik Analisis Data	49
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	
4.1.Propil PWM	51
4.1.1 Sejarah Singkat PWM NTB	51
4.1.2 Struktur Pengurus PWM NTB	53
4.1.3 Gambaran Lokasi Penelitian	55
4.2.Prilaku Politik Elite Muhammadiyah	58
4.2.1 Kepentingan Yang Sama	58
4.2.2 Kesamaan ideologi	59
4.2.3 Solidarits	60
4.2.4 Keuntungan Ekonomi	61

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Muhammadiyah secara institusi tetap istiqomah tak masuk ke politik praktis. Agar bangsa ini ada kartu pengaman,” ujar Haedar Nashir, setelah mengisi ceramah Shalat Idul Adha 1439 H/2018 di lapangan Koperbi di komplek kantor Bank Indonesia, Rabu (22/8/2018).

Meskipun Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, bukan sebagai organisasi politik. Namun demikian tidak berarti bahwa Muhammadiyah anti politik, karena bagaimana pun Muhammadiyah berkepentingan dengan politik untuk mendukung dan melancarkan gerakan dakwahnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan politik, Muhammadiyah selalu berhati-hati dan bersikap lentur, dengan tetap menjaga khittah gerakan Muhammadiyah.

Haedar Nasir dalam Qodir (2010:43) Sebagai gerakan islam non politik Muhammadiyah dalam AD (Anggaran Dasar 1912), Merumuskan tujuan berdirinya “ Menyebarkan Pengajaran agama Nabi Muhammad Sallahu ‘alaihi Salam Kepada Penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Secara normatif bagaiman hubungan Muhammadiyah dengan politik sudah di atur dengan terang dan jelas dalam dokumen resmi organisasi seperti Muqadimaah, Anggaran Dasar muhammadiyah Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Khittah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Samapai dengan Keputusan – keputusan Mukhtamar dan Tanwir. Semua itu telah membentuk Khazanah kaya dan

komprehensif yang antara lain berisi ketentuan – ketentuan Normatif mengenai Khittah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, dan amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat non politik.

Meski secara organisasi muhammadiyah menyatakan sikap berada pada posisi netral dalam politik, tetapi muhamadiyah di penuh oleh elit. Meskipun persentase elit dengan anggota lebih sedikit tetapi bisa di jadikan representatif dukungan muhammadiyah. Elit yang di maksud disini adalah pada Ruang lingkup kepengurusan Muhammadiyah dari level Pengurus Pusat (PP) hingga ke pengurus Ranting organisasi Muhammadiyah.

Syafii Maarif (2010:8) Ribuan kali penegasan muhammadiyah tidak berpolitik praktis tapi tidak menyurutkan langkah-langkah elit muhammadiyah untuk terus berinteraksi politik dan menghimpitkn diri dengan politik sejak pendirinya K.H Ahmad dahlan menjadi anggota partai politik, lalu zaman orde lama di masyumi dan Parmusi, serta PAN dan PMB dan dukungan kepada capres atau Calon Kepala Daerah tertentu bahkan terlibat aktif dalam partai politik untuk melanggengkan kekuasaanya.

Penggambaran mengenai keragaman sikap Politik elit muhammadiyah bukan Hal baru misalnya Dalam ungkapan Afan Gaffar, guru besar ilmu politik UGM yang merangkap sebagai anggota Majelis Hikmah PP Muhammadiyah pernah mengeluarkan Stetmen kontroversial mengenai varian elit muhammadiyah yang terbagi atas tiga golongan yaitu: Elit yang mencari Makan dari muhammadiyah, elit yang mencari legitimasi, dan yang terakhir adalah elit yang ikhlas. Varian- varian muhammadiyah lainnya kemudian bermunculan termasuk

muhammadiyah- politisi dan Muhammadiyah Idiologis yang anti terhadap kolompok yang mencoba membawa muhammadiyah dalam panggung Politik. Fenomena ini mempunyai runtutan sejarah yang cukup panjang dalam metamorphosis elit tradisional menjadi elit moderen yg merupakan pertarungan perbutan pengaruh dan upaya pertahanannya.

Sikap Politik elit Muhammadiyah tidak lah tunggal, melainkan prular gerakan Muhamadiyah yang bercorak moderen, dinamis, dan progresif tidak selamanya berlaku normatif, tentunya Pilihan Elitnya pasti rasional. Faktor kepemimpinan yang bersifat Kolektif- kolegial dan tidak adanya satu komando juga mempengaruhi variasi sikap politik elit muhammadiyah. Kebijakan- kebijakan yg telah menjadi keputusan pun terkadang tidak begitu berpengaruh, seperti kasus kelahiran PAN maupun PMB yang tetap memunculkan perdebatan publik mengenai hubungannya dengan muhammadiyah. Begitu juga sikap – sikap elit muhammadiyah terhadap Pemilihan Gubernur NTB.

Dalam kasus pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018, meski Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) tidak terlibat secara formal mengatasnamakan organisasi dalam menentukan pilihan. Tetapi tentunya Elit Muhammadiyah mempunyai pilihan dan tentu dalam menentukan pilihan elit Muhammadiyah akan mempertimbangkan dengan baik Pilihannya, entah itu berdasarkan ekonomi, sosial, kepentingan politik, atau kepentingan organisasi.

Sebagai Tokoh Muhammadiyah yang di sebut Elit mempunyai karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan. Elit dengan massa yang

sangat hormat kepadanya mampu mendorong atau mendulung suara kemenangan untuk calon Gubernur atau Wakil Gubernur. Sebagai imbalan atas jerih payah elit tersebut, Kepala Daerah akan memberikan berbagai macam fasilitas, sehingga implikasi politik yang berpengaruh terhadap pilihan politik rakyat yang sudah dipengaruhi oleh berbagai macam *iming-iming*, tidaklah lagi otonom karena hak yang seharusnya lebih banyak dimanfaatkan oleh rakyat sebagai cermin dari kedaulatan sudah teracuni berbagai kepentingan materi dan kekuasaan. Tarik menarik “kepentingan” antara kandidat dengan Elit menjadi hal yang wajar. Hal ini dikarenakan, posisi Elit Muhammadiyah sangat menentukan keberhasilan seorang calon Kepala Daerah di NTB.

Meski didalam beberapa kesempatan ketua umum PWM NTB sering mendeklarasikan bahwa Muhammadiyah tetap pada khitah Denpasar pada tahun 2002 yaitu tidak terjun kepada sikap mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi politik. Tetapi dalam kepentingan Elit PWM tentunya ini menjadi sebuah tanda tanya besar tulisan ini, karna melihat kepentingan dan tujuan elit untuk menjadikan NTB lebih baik dan mengabdikan diri untuk NTB. Meski secara keorganisasian tidak melibatkan diri tapi sikap pribadi elit sangat sulit di tebak.

Tidak ada larangan khusus bagi kader Muhammdiyah terlibat dengan politik praktis, tetapi bukankah dukungan atau pernyataan pengurus atau elit Muhammadiyah juga menjadi rujukan bagi kader perserikatan untuk menentukan pilihan kepada salah satu pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB 2018.

Sesuai dengan pernyataan Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang dikutip dari <http://merdeka.com> yang mengatakan Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada warganya untuk menentukan afliasi hak politiknya. Dan juga pernyataan serupa di sampaikan oleh Din Samsudin yang juga mantan ketua umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 menjelaskan di Majalah Tempo pada tanggal 05/04/09 yang menyatakan “Silahkan ada perbedaan politik, ada fragmentasi politik, tapi perlu bersatu dalam isu – isu strategis kebangsaan.” Karena Muhammadiyah secara keorganisasian akan mengembangkan sikap politik nilai yang lebih mengutamakan Kemaslahatan umat. Dan tentunya ini menjadi rujukan besar di kalangan Individu elitnya untuk terlibat bahkan untuk menjadi pemain dalam kontestasi politik. Salah satu contoh jika di kalangan elit nasional Muhammadiyah Amin Rais selaku mantan ketua umum PP Muhammadiyah dan sekaligus mantan ketua Partai Amanat Nasional yg pernah menjabat di Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tidak hanya Amin Rais Tetapi juga Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak adalah seorang akademisi sekaligus aktivis Pemuda Muhammadiyah yang kemudian dipercaya sebagai Koordinator Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk Pilpres 2019. (<https://www.viva.co.id/siapa/read/961-dahnil-anzar-simanjuntak>).

Tentu juga Keterlibatan elit di pengurus wilayah Muhammadiyah juga masih ada yang terlibat dan dengan politik praktis, salah satu Contohnya ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lombok Utara Djohan Samsu yang

juga Pernah menjabat Sebagai Bupati Lombok Utara. Hal ini sebagai bukti bahwa elit muhammadiyah NTB juga tidak anti terhadap politik praktis.

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk di jadikan bahan penelitian dengan judul “Prilaku Elit Politik Muhammadiyah Dalam Pilkada NTB 2018 Studi Kasus PWM NTB”.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah perilaku Politik Elite Muhammadiyah NTB dalam Pilkada NTB 2018?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perilaku elit Muhammadiyah NTB Dalam Pilkada NTB 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap proses kegiatan maupun usaha, tentu di harapkan adanya manffat dan kegunaanya. Demikian juga dengan penelitian ini, yang di harapkan mempunyai manfaat praktis, sebagai berikut.

1. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan rujukan atau sumber data kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas Prilaku politik ormas dan elit Muhammadiyah.

3. Manfaat Praktisi

Sebagai masukan kepada elite atau Pengurus Wilayah Perserikatan Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan . selain itu, jenis penelitian dan metode penelitian dan temuan serta kesimpulan dari penelitian terdahulu dapat di gunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian dapat dengan mudah bagi peneliti untuk menemukan posisi penelitian tentang Prilaku Elit Politik Muhammadiyah Dalam Pilkada 2018 (*studi kasus PWM NTB*)

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul / Tahun	Peneliti	Kesimpulan
1	<i>Perilaku Politik Dan Elite (Studi tentang Pengaruh Elite PWNU Pada Pilkada DKI 2017 Terhadap Khitah /1926 /2017</i>	Diah Lestari	Pengaruh faktor perilaku politik elite PWNU ada 4 yaitu <i>Pertama</i> , lingkungan sosial politik tidak langsung yaitu dipengaruhi oleh budaya politik partisipan yang mempengaruhi cara pandang perilaku politik individu dalam menentukan perilaku politik. <i>Kedua</i> , lingkungan sosial politik langsung yaitu faktor agama menjadi penentu dan menjadi dominan dalam menentukan perilaku politik. <i>Ketiga</i> , struktur keperibadian elite, peran Syuriah dalam PWNU sangat berpengaruh mempengaruhi pengurus lainnya dalam menentukan

			sikap politik.
2	<i>Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015</i>	Muhammad Fadil	<p>Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2015 memiliki dampak yang cukup baik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal ini dikarenakan peran elit lokal dan penyelenggara Pilkada dalam mensosialisasikan informasi tentang Pilkada. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi Pilkada. Akan tetapi terdapat faktor pendorong lain sehingga masyarakat aktif berpartisipasi, yaitu dengan</p>

			diberikan imbalan materi.
3	<p>Elit Muhammadiyah</p> <p><i>Dalam Politik (Studi Kasus : Kemeangan A. M. Iqbal Parewangi Sebagai Anggota DPD RI Pada Pemilu 2014)</i></p>	Suratman	<p>1. Elit Muhammadiyah melakukan sosialisasi politik ke daerah – daerah, dalam kunjungannya tersebut elit Muhammadiyah memperkenalkan Iqbal Parewangi sebagai kader Muhammadiyah yang akan mencalonkan pada Pemilu 2014 sebagai Caleg DPD RI kepada warga Muhammadiyah di berbagai daerah.</p> <p>2. Elit Muhammadiyah memanfaatkan jaringan External dan amalan usahanya untuk ikut memenangkan Iqbal Parewangi. Amalan usaha yang digerakkan adalah massa dari civitas akademika di berbagai perguruan tinggi</p>

		<p>Muhammadiyah di Sulawesi selatan. Sedangkan jaringan External merupakan jaringan di luar struktur organisasi Muhammadiyah seperti media massa dan beberapa kepala daerah yang merupakan kader Muhammadiyah.</p> <p>3. Elit Muhammadiyah menggerakkan organisasi otonom untuk mengawal pemilu. Mengawal pemilu yang dimaksudkan adalah mengawal kemenangan Iqbal Parewangi baik pada masa kampanye hingga proses perhitungan suara.</p> <p>Dengan upaya-upaya yang dilakukan elit itulah sehingga Iqbal Parewangi memenangkan Pemilu 2014 setelah sebelumnya pada</p>
--	--	---

		<p>pemilu 2009 tidak mendapat dukungan secara langsung oleh PWM melainkan PWM memutuskan mendukung kader lain serta adanya fragmentasi suara antara Muhammadiyah dan aisyiyah membuat Perolehan suara Iqbal Parewangi hanya sekitar 53.552 Suara. Namun pada pemilu 2014, setelah mendapat restu dari perserikatan serta hilangnya perpecahan di internal Muhammadiyah merupakan momen yang sangat pas untuk Iqbal Parewangi dan alhasil memperoleh 273.785 suara. Lonjakan Perolehan suara tersebut juga tidak terlepas dari modal sosial yang memang melekat pada beliau dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang</p>
--	--	---

			<p>Elit Muhammadiyah yang berperan aktif menyukseskan beliau. Dengan demikian penulis setuju bahwa Muhammadiyah memang merupakan mesin kekuatan politik dalam menggerakkan suara.</p>
4	<p><i>jurnal perbedaan sikap politik elektoral muhammadiyah antara pusat dan daerah Sikap / 2018</i></p>	<p>Ahmad Sholikin</p>	<p>Dalam jurnal perbedaan sikap politik elektoral muhammadiyah antara pusat dan daerah Sikap politik Muhammadiyah adalah sikap dan pandangan politik dari para elite Muhammadiyah yang terejawantahkan dalam keputusan organisasi Muhammadiyah. Elite Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, dengan meminjam analisa Robert D. Putnam,</p>

		<p>elite Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kader Muhammadiyah yang menjabat secara struktural di Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memiliki pengaruh terhadap setiap kebijakan organisasi. Selain itu dalam penelitian ini juga memasukkan elite yang memiliki reputasi dalam Muhammadiyah tetapi sudah tidak menjabat dalam kegiatan struktural Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Elite informal ini didominasi oleh mantan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memiliki reputasi dan dukungan massa dalam Muhammadiyah.</p> <p>Kebijakan politik</p>
--	--	---

		<p>Muhammadiyah dalam menentukan sikap politiknya selalu menyesuaikan berbagai kondisi dimana kebijakan tersebut harus diambil, selain itu juga bagaimana konstelasi kekuatan elite kolektif kolegial Muhammadiyah didominasi oleh para elite yang memiliki pandangan politik seperti apa. Garis kebijakan politik Muhammadiyah jika dikelompokkan berdasarkan perjalanannya, bisa diklasifikasikan kedalam tiga model; 1. Formal-langsung, 2. Personal-tidak langsung, dan Netral (Netralitas aktif dan pasif). Pola hubungan Muhammadiyah dan politik pada Pemilu 2014 tidak lepas dari peran- peran elite</p>
--	--	--

		<p>Muhammadiyah pada kepemimpinan 2010-2015. Netralitas politik Muhammadiyah yang selama ini selalu menjadi jargon Muhammadiyah atau merupakan pilihan terbaik yang harus diambil oleh organisasi sosial keagamaan memiliki berbagai wujud dalam perjalanannya. Mengacu pada kerangka teori dari Belloni maka, faksionalisasi dalam tubuh Muhammadiyah juga terlihat sangat jelas dalam Pilihan Presiden 2014. Dimana ada tiga model faksionalisasi; a. Faksi “pandangan politik”, terkait isu-isu mendasar bagaimana pola hubungan Islam dan politik, b. Faksi “Patron-klient”,</p>
--	--	--

		<p>mengutamakan kedekatan informal antara elite Muhammadiyah dengan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berebut kuasa dalam Pemilu, c. Faksi “terorganisir”, adanya dua lembaga yang terstruktur dengan jelas dalam tubuh Muhammadiyah yang merupakan bentukan dari massa Muhammadiyah yang terorganisir.</p> <p>Peran elite informal dalam Muhammadiyah dalam memainkan peran politiknya merupakan sebuah strategi dari Muhammadiyah untuk menjaga dan mempertahankan netralitas politiknya. Elite informal dalam Muhammadiyah merupakan</p>
--	--	--

		<p>orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab struktural kepada organisasi Muhammadiyah, tetapi memiliki simpatisan dan loyalis dalam orang-orang Muhammadiyah. Khittah Politik Muhammadiyah merupakan sebuah struktur pembatas bagi para elite formal Muhammadiyah, dan ini terbukti selama ini Muhammadiyah masih eksis dengan jargon netral dalam berpolitik praktis. Khittah menjadi pilihan yang memberikan <i>win-win solution</i> bagi para elite formal Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan sikap politiknya. Khittah berfungsi sebagai garis pembatas dan pembeda Muhammadiyah</p>
--	--	---

		<p>agar tetap berada di koridornya yakni bergerak di bidang dakwah dan tajdid di lapangan kemasyarakatan, serta tidak bergerak dalam politik-praktis di ranah perjuangan kekuasaan sebagaimana partai politik.</p> <p>Ketika dipotret dari level elite Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjukkan bahwa ke-13 elite pimpinan tersebut berhasil dan mampu membawa Muhammadiyah di level nasional menjadi sebuah organisasi yang jauh dari politik kekuasaan. Tetapi ketika dipotret pada level lokal/daerah logika kelembagaan netral Muhammadiyah menampakkan fakta yang berbeda. Potret Kabupaten</p>
--	--	---

		<p>Sleman dan Kabupaten Maros menunjukkan bahwa Muhammadiyah di level lokal secara oraganisasi memberikan dukungan penuh kepada kader- kadernya untuk dapat menduduki jabatan politik dari sebuah pemerintahan. Jabatan eksekutif Bupati dan jabatan Dewan Perwakilan Daerah menjadi jabatan strategis yang dapat diraih oleh Muhammadiyah didaerah. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tercermin dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.0/B/2013, atau lebih dikenal dengan SK-PP: 41. Surat Keputusan yang</p>
--	--	--

			<p>diterbitkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada 26 Maret 2013 merupakan sebuah kebijakan yang mengatur bagaimana pola hubungan Muhammadiyah di daerah ketika berhubungan dengan politik praktis. Tetapi masing-masing daerah memiliki keunikan dan memiliki elite yang otonom dengan kepentingan dan ijtihadnya sendiri. Sehingga jarak teritorial dan jarak politik mempengaruhi bagaimana Muhammadiyah Pusat dan Muhammadiyah Daerah dalam menerjemahkan ijtihad dan netralitas politik tersebut.</p>
5	<p><i>Jurnal Dinamika Islam Dan Politik Elit - Elit Muhammadiyah Periode 1998-2010 /2008</i></p>	<p>Ridho Al-Hamdi</p>	<p>Muhammadiyah tidaklah bersifat tunggal melainkan variatif. Terjadinya varian sikap politik tersebut</p>

		<p>dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikategorisasikan ke dalam dua hal. <i>Pertama</i>, kategori latar belakang sosiologis elite, meliputi empat faktor yaitu: faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor relasi atau pergaulan, dan faktor orientasi politik individu. <i>Kedua</i>, kategori organisatoris, meliputi tiga faktor yaitu: faktor visi gerakan Muhammadiyah, faktor sikap resmi Muhammadiyah, dan faktor kontinuitas sejarah. Masing-masing faktor mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan perbedaan sikap di antara elite-elite Muhammadiyah.</p>
--	--	--

Berdasarkan pada tabel di atas, maka penulis mengemukakan hasil penelitian terdahulu. *Pertama* adalah Sekerifsi Diah Iestari (2017) melakukan penelitian dengan judul “Perilaku Politik dan Elit (Studi Tentang Pengaruh Pilihan politik Elite PWNU pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terhadap Khittah 1926) yang dimuatkan dalam sebuah Sekripsi pada program studi ilmu politik UIN Sarif Hidayatullah Jakarta. Metode Penelitian yang di gunakan adalah Metode Kualitatif dengan hasil penelitian antara lain:

Pengaruh faktor perilaku politik elite PWNU ada 3 yaitu *Pertama*, lingkungan sosial politik tidak langsung yaitu dipengaruhi oleh budaya politik partisipan yang mempengaruhi cara pandang perilaku politik individu dalam menentukan perilaku politik. *Kedua*, lingkungan sosial politik langsung yaitu faktor agama menjadi penentu dan menjadi dominan dalam menentukan perilaku politik. *Ketiga*, struktur keperibadian elite, peran Syuriah dalam PWNU sangat berpengaruh mempengaruhi pengurus lainnya dalam menentukan sikap politik.

Penelitian Berikutnya adalah jurnal dari Muhammad Fadill yang Berjudul “Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Hasil Partisipasi elit lokal di Toraja Utara dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kapasitas dari setiap elit lokal. Elit lokal yang berpartisipasi sebagai penyelenggara Pilkada merupakan tokoh agama dan tokoh adat yang direkrut oleh KPU atau Panwaslu Kabupaten Toraja Utara. Elit politik yang merupakan repsentasi dari partai politik sudah barang tentu menjadi bagian dari tim pemenang pasangan calon. Ada juga

sebagian tokoh agama dan tokoh adat yang tergabung dalam tim pemenangan pasangan calon bupati/wakil bupati. Sedangkan tokoh agama (BPS) turut serta mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan kegamaan.

Selanjutnya skripsi Suratman (2017) dengan Judul “Elit Muhammadiyah Dalam Politik (Studi Kasus : Kemeangan A. M. Iqbal Parewangi Sebagai Anggota DPD RI Pada Pemilu 2014) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Hasil : A. M Iqbal Parewangi sebagai kader Muhammadiyah mendapat dukungan penuh dari perserikatan Muhammadiyah berdasarkan keputusan rapat pleno PWM yang dihadiri oleh elit Muhammadiyah Sulawesi selatan. Berdasarkan keputusan tersebut, Elit Muhammadiyah bergerak dan mengupayakan berbagai cara untuk memenangkan Iqbal Parewangi. Alhasil Iqbal Parewangi lolos sebagai anggota DPD RI periode 2014 – 2019. Adapun upaya-upaya yang dilakukan elit Muhammadiyah dalam memenangkan Iqbal Parewangi Sebagai berikut :

- 1) Elit Muhammadiyah melakukan sosialisasi politik ke daerah – daerah, dalam kunjungannya tersebut elit Muhammadiyah memperkenalkan Iqbal Parewangi sebagai kader Muhammadiyah yang akan mencalonkan pada Pemilu 2014 sebagai Caleg DPD RI kepada warga Muhammadiyah di berbagai daerah.
- 2) Elit Muhammadiyah memanfaatkan jaringan External dan amalan usahanya untuk ikut memenangkan Iqbal Parewangi. Amalan usaha yang digerakkan adalah massa dari civitas akademika di berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi selatan. Sedangkan jaringan External

merupakan jaringan di luar struktur organisasi Muhammadiyah seperti media massa dan beberapa kepala daerah yang merupakan kader Muhammadiyah.

- 3) Elit Muhammadiyah menggerakkan organisasi otonom untuk mengawal pemilu. Mengawal pemilu yang dimaksudkan adalah mengawal kemenangan Iqbal Parewangi baik pada masa kampanye hingga proses perhitungan suara.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan elit itulah sehingga Iqbal Parewangi memenangkan Pemilu 2014 setelah sebelumnya pada pemilu 2009 tidak mendapat dukungan secara langsung oleh PWM melainkan PWM memutuskan mendukung kader lain serta adanya fragmentasi suara antara Muhammadiyah dan aisyiyah membuat Perolehan suara Iqbal Parewangi hanya sekitar 53.552 Suara. Namun pada pemilu 2014, setelah mendapat restu dari perserikatan serta hilangnya perpecahan di internal Muhammadiyah merupakan momen yang sangat pas untuk Iqbal Parewangi dan alhasil memperoleh 273.785 suara. Lonjakan Perolehan suara tersebut juga tidak terlepas dari modal sosial yang memang melekat pada beliau dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang Elit Muhammadiyah yang berperan aktif menyukseskan beliau. Dengan demikian penulis setuju bahwa Muhammadiyah memang merupakan mesin kekuatan politik dalam menggerakkan suara.

Penelitian Berikutnya adalah Ahmad Sholikin (2018) dalam jurnal perbedaan sikap politik elektoral muhammadiyah antara pusat dan daerah Sikap politik Muhammadiyah adalah sikap dan pandangan politik dari para elite

Muhammadiyah yang terejawantahkan dalam keputusan organisasi Muhammadiyah.

Garis kebijakan politik Muhammadiyah jika dikelompokkan berdasarkan perjalanan sejarahnya, bisa diklasifikasikan kedalam tiga model; 1. Formal-langsung, 2. Personal-tidak langsung, dan Netral (Netralitas aktif dan pasif). Pola hubungan Muhammadiyah dan politik pada Pemilu 2014 tidak lepas dari peran- peran elite Muhammadiyah pada kepemimpinan 2010-2015. Netralitas politik Muhammadiyah yang selama ini selalu mejadi jargon Muhammdiyah atau merupakan pilihan terbaik yang harus diambil oleh organisasi sosial keagamaan memiliki berbagai wujud dalam perjalanannya. Mengacu pada kerangka teori dari Belloni maka, faksionalisasi dalam tubuh Muhammadiyah juga terlihat sangat jelas dalam Pilihan Presiden 2014. Dimana ada tiga model faksionalisasi; a. Faksi “pandangan politik”, terkait isu-isu mendasar bagaimana pola hubungan Islam dan politik, b. Faksi “Patron-klient”, mengutamakan kedekatan informal antara elite Muhammadiyah dengan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berebut kuasa dalam Pemilu, c. Faksi “terorganisir”, adanya dua lembaga yang terstruktur dengan jelas dalam tubuh Muhammadiyah yang merupakan bentukan dari massa Muhammadiyah yang terorganisir.

Peran elite informal dalam Muhammadiyah dalam memainkan peran politiknya merupakan sebuah strategi dari Muhammadiyah untuk menjaga dan mempertahankan netralitas politiknya. Elite informal dalam Muhammadiyah merupakan orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab struktural kepada organisasi Muhammadiyah, tetapi memiliki simpatisan dan loyalis dalam orang-

orang Muhammadiyah. Khittah Politik Muhammadiyah merupakan sebuah struktur pembatas bagi para elite formal Muhammadiyah, dan ini terbukti selama ini Muhammadiyah masih eksis dengan jargon netral dalam berpolitik praktis. Khittah menjadi pilihan yang memberikan *win-win solution* bagi para elite formal Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan sikap politiknya. Khittah berfungsi sebagai garis pembatas dan pembingkai Muhammadiyah agar tetap berada di koridornya yakni bergerak di bidang dakwah dan tajdid di lapangan kemasyarakatan, serta tidak bergerak dalam politik-praktis di ranah perjuangan kekuasaan sebagaimana partai politik.

Ketika dipotret dari level elite Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjukkan bahwa ke-13 elite pimpinan tersebut berhasil dan mampu membawa Muhammadiyah di level nasional menjadi sebuah organisasi yang jauh dari politik kekuasaan. Tetapi ketika dipotret pada level lokal/daerah logika kelembagaan netral Muhammadiyah menampakkan fakta yang berbeda. Potret Kabupaten Sleman dan Kabupaten Maros menunjukkan bahwa Muhammadiyah di level lokal secara organisasi memberikan dukungan penuh kepada kader-kadernya untuk dapat menduduki jabatan politik dari sebuah pemerintahan. Jabatan eksekutif Bupati dan jabatan Dewan Perwakilan Daerah menjadi jabatan strategis yang dapat diraih oleh Muhammadiyah di daerah. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tercermin dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.0/B/2013, atau lebih dikenal dengan SK-PP: 41. Surat Keputusan yang diterbitkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada 26 Maret 2013 merupakan sebuah kebijakan yang

mengatur bagaimana pola hubungan Muhammadiyah di daerah ketika berhubungan dengan politik praktis. Tetapi masing-masing daerah memiliki keunikan dan memiliki elite yang otonom dengan kepentingan dan ijtihadnya sendiri. Sehingga jarak teritorial dan jarak politik mempengaruhi bagaimana Muhammadiyah Pusat dan Muhammadiyah Daerah dalam menerjemahkan ijtihad dan netralitas politik tersebut.

Selanjutnya Penelitian Ridho Al-Hamdi (2012) dalam jurnal dinamika islam dan politik elit - elit muhammadiyah periode 1998-2010 Politik kaum modernis di era reformasi yang direpresentasikan oleh elit-elit Muhammadiyah tidaklah bersifat tunggal melainkan variatif. Terjadinya varian sikap politik tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikategorisasikan ke dalam dua hal. *Pertama*, kategori latar belakang sosiologis elite, meliputi empat faktor yaitu: faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor relasi atau pergaulan, dan faktor orientasi politik individu. *Kedua*, kategori organisatoris, meliputi tiga faktor yaitu: faktor visi gerakan Muhammadiyah, faktor sikap resmi Muhammadiyah, dan faktor kontinuitas sejarah. Masing-masing faktor mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan perbedaan sikap di antara elite-elite Muhammadiyah.

2.2. Definisi Perilaku Politik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap, tidak saja badan dan ucapan, dan politik tetapi segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintah negara atau negara lain. Teori mengenai perilaku politik adalah bagian dari dasar pemikiran kaum

behavioralisme yang memandang bahwa kehidupan politik tidak terlepas dari perilaku-perilaku politik yang menyertainya. Dalam kaitannya dengan perilaku politik, pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang melakukan kegiatan politik, individu atau struktur dalam pendekatan behaviorisme, individu yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku organisasi pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu.

Menurut Ramlan Surbakti (2010:168) secara terminologis perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga dengan pemerintah, dan interaksi antara kelompok individu dengan masyarakat. Dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

Menurut Miftah Thoha (1983:34) perilaku organisasi adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya, oleh karena itu untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya terlebih dahulu mengetahui perilaku politik dari individu sebagai pendukung organisasi. Individu sebagai pendukung organisasi adalah pengurus dari organisasi/elite yang dapat mengendalikan arah organisasi, dengan perilaku politik yang dimiliki.

2.3. Teori Elit

Suzanne Keller (1953:3) Istilah elite berasal dari bahasa Inggris *elite* yang juga berasal dari bahasa latin *eligere*, yang berarti memilih. Istilah elite digunakan pada abad ke-17 untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus, yang kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok social tinggi seperti kesatuan-kesatuan militer atau kalangan bangsawan.

Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews (2000:91) Pembahasan tentang elite dalam kerangka teoritik ini merujuk pada makna yang telah dikonsepsikan Robert Putnam, Vilfredo Pareto, dan Gaetano Mosca. Definisi elite menurut Robert Putnam, adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain.

T.B Bottomore (1999:4) Menurut Mosca dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, sedangkan yang kedua, kelas yang jumlahnya lebih banyak.

Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering di artikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda di lingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum (*non-elite*). (Jayadi Nas, 2007:34)

Garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan.

Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam daripada elit tradisional. (Robert Van Niel, 1984:12)

Menurut penulis dari beberapa paparan teori di atas peneliti lebih condong menggunakan teori elit menurut Mosca dan Pareto karna pengertian elit yang menjadi fokus peneliti adalah elit sebagai individu yang mempunyai jabatan struktural dalam organisasi Muhammadiyah atau yang menjalankan roda organisasi yang memerintah atau pengambil kebijakan (*governing elite*), karna elit yang menjabat dalam struktural pengurus Muhammadiyah mewakili suara dari organisasi muhammadiyah.

2.4. Teori Pilihan Rasional

Hugh Ward (dalam jurnal *Joash Tapiheru*), melalui tulisannya yang berjudul Rational Choice mengatakan, “Rational-choice adalah bagian tak terpisahkan dari perangkat analisa para ilmuwan politik, karena banyak fenomena penting yang bisa dijelaskan, paling tidak secara parsial, dari perspektif ini.” Pernyataan positif dan simpatik terhadap rational-choice theory ini tidak berarti bahwa rational-choice theory memiliki posisi yang mapan dalam jagad diskursus ilmu politik. Meskipun diaplikasikan secara luas dalam berbagai area ilmu politik, banjir kritik dan prasangka dijatuhkan pada perspektif yang satu ini. Kritik yang dilontarkan pada teori ini sangat beragam, mulai dari kritik yang menyatakan bahwa rational-choice theory memiliki kecenderungan ideologi kanan sampai pada ‘mereduksi manusia sekedar menjadi satu makhluk yang semata-mata digerakkan oleh nalar.’ Terlepas dari berbagai kritik tersebut, adalah naïf mengabaikan sebuah pendekatan, sebagai perangkat analisa, yang memiliki

kapasitas analisis dan eksplanasi sekuat rational-choice theory.(Dunleavy dkk:2002)

Pada kenyataannya, teori rational-choice tidak terkait dengan posisi ideologis tertentu. Jika dilihat secara metodologis, memang rational choice berdiri pada posisi metodologi individualism. Artinya, rational-choice memandang bahwa pemahaman terhadap fenomena sosial dibangun dari pemahaman terhadap preferensi, keyakinan, dan strategi individu. Tetapi, teori ini tidak serta merta hanya digunakan oleh para penganut paham individualism liberal.

2.4.1 Asumsi-asumsi Dasar teori Rational-Choice

Elster J (1989:22) Esensi dari rational-choice adalah ‘ketika dihadapkan pada beberapa alur tindakan, manusia biasanya akan memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut’. Kesimpulan itu dijabarkan secara lebih detil dalam premis-premis dasar rational-choice theory, sbb.:

- Manusia memiliki seperangkat preferensi-preferensi yang bisa mereka pahami, mereka tata menurut skala prioritas, dan dibandingkan antara satu dengan yang lain.
- Tatanan preferensi ini bersifat transitif, atau konsisten dalam logika. Misalnya, jika seseorang lebih memilih sosialisme dibanding liberalisme, dan liberalism dibanding fasisme, maka orang tersebut pasti lebih memilih sosialisme dibanding fasisme.
- Tatanan preferensi itu didasarkan pada prinsip ‘memaksimalkan manfaat’ dan ‘meminimalkan resiko’.

- Manusia pada dasarnya adalah mahluk yang egois.

Premis-premis ini menjadi basis bagi pengembangan preposisi-preposisi teoritik rational-choice. Premis ini bisa diturunkan lagi menjadi menjadi premis-premis yang sifatnya lebih spesifik. Turunan dari premis-premis utama tersebut bisa dikategorikan dalam *premis dari sisi permintaan* dan *premis dari sisi penawaran*. Premis dari sisi permintaan diasumsikan bahwa setiap manusia memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam membuat keputusan-keputusan politik, atau sama saja dengan mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki segala informasi yang dibutuhkan. Selain itu diasumsikan bahwa preferensi-preferensi manusia, secara eksogen, bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh partisipasi mereka dalam berbagai proses pilihan politik yang menjadi obyek kajian.

(Dunleavy dkk2002:4) Sementara itu, dari sisi penawaran diasumsikan bahwa seluruh entitas kolektif (seperti perusahaan, partai politik, birokrasi, dsb.) bisa diperlakukan sebagai aktor-aktor yang sama-sama digerakkan oleh premis-premis rasionalitas di atas. Dari sisi penawaran, rational-choice juga memandang para pengambil-keputusan sebagai aktor-aktor yang hanya memiliki satu jalur tunggal, sebagai jalur yang paling rasional dan obyektif, untuk memaksimalkan keuntungan mereka, dan tidak ada jalur yang lain.

Premis-premis di atas memang terlihat sangat kental nuansa ekonominya. Ini tidak mengherankan karena teori rational-choice adalah usaha untuk menjelaskan fenomena politik melalui teknik-teknik analisa ekonomi, yang dalam disiplin ilmu ekonomi biasa digunakan untuk menganalisa perilaku produsen dan

konsumen. Pendekatan ini dikenal juga dengan nama pendekatan ‘ekonomi-politik’ karena dalam pendekatan ini menggabungkan disiplin ilmu ekonomi dan disiplin ilmu politik. Pendekatan ini juga dikenal dengan istilah ‘public-choice’ karena berfokus pada pilihan-pilihan publik atau kolektif, yang dikontraskan dengan pilihan-pilihan privat individu yang biasanya menjadi obyek analisa dalam ekonomi-mikro.

Dalam perkembangannya, melalui proses saling-kritik, muncul banyak variasi pendekatan dalam teori rational-choice. Dunleavy mengidentifikasi empat pendekatan dominan dalam diskursus teori rational choice, yaitu (a)pendekatan pluralis (b)pendekatan corporatis, (c)pendekatan collective-action, dan (d) pendekatan new-right. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki tafsir yang berbeda terhadap premis-premis utama rational-choice di atas. Masing-masing dengan fokus dan penekanan yang berbeda.

Pendekatan pluralis, dari premis diatas menafsirkan, mengasumsikan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda, maka secara sukarela mereka akan memilih kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dan bisa mengakomodasi kepentingannya. Kelompok seperti inilah yang sering kita sebut sebagai *interest group* (*kelompok kepentingan*). Kelompok kepentingan ini menjadi fokus kajian utama dalam pendekatan pluralis. Dalam kelompok kepentingan ini diasumsikan bahwa relasi yang terjadi didalamnya didasarkan pada kesamaan kepentingan dan relasinya cenderung didasarkan pada kesukarelaan anggotanya. Keberadaan kelompok semacam ini juga sangat ditentukan oleh keterlibatan anggotanya dan cenderung hanya memfokuskan

perhatian pada isu-isu spesifik yang sifatnya seringkali sangat praktis. Berbeda dengan partai politik yang cenderung merangkai berbagai isu dalam paket-paket, sehingga menyederhanakan pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pemilih dalam pemilu.

Pendekatan lain dalam rational-choice adalah pendekatan *korporatis*. Pendekatan korporatis ini mengakui dan menyepakati bahwa rutinitas pembuatan kebijakan di negara-negara demokratis Barat beroperasi sebagaimana dipahami dan dijelaskan dalam pendekatan pluralis. Tetapi, pendekatan korporatis menambahkan bahwa dalam kenyataannya, kelompok-kelompok kepentingan tidak memberikan pengaruh yang setara, baik secara kualitas maupun kuantitas, terhadap proses kebijakan. Kelompok-kelompok kepentingan tertentu cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses kebijakan dibanding kelompok kepentingan yang lain.

Dunleavy mengilustrasikan penjelasan di atas dengan melihat perbedaan derajat pengaruh kelompok-kelompok kepentingan ekonomi utama – serikat buruh, asosiasi bisnis dan perdagangan besar dan asosiasi profesional – yang menurut pendapatnya disebabkan oleh empat alasan.

Alasan yang pertama adalah *basis kelas*. Kelompok-kelompok kepentingan ekonomi terbagi menurut garis kelas sosial dan/atau pekerjaan. Tarik menarik antara kepentingan-kepentingan ini akan sangat berpengaruh bagi arah kebijakan ekonomi dan pembangunan suatu negara.

Kedua, *kontrol terhadap sumber daya*. Kelompok-kelompok kepentingan besar melakukan kontrol kolektif terhadap sumberdaya yang vital bagi

keseluruhan aktifitas ekonomi. Variasi struktural kontrol terhadap sumberdaya ini merupakan variabel penjelas penting dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan bagaimana satu kelompok kepentingan yang sama diorganisir dengan cara yang berbeda, di waktu dan/atau tempat yang berbeda.

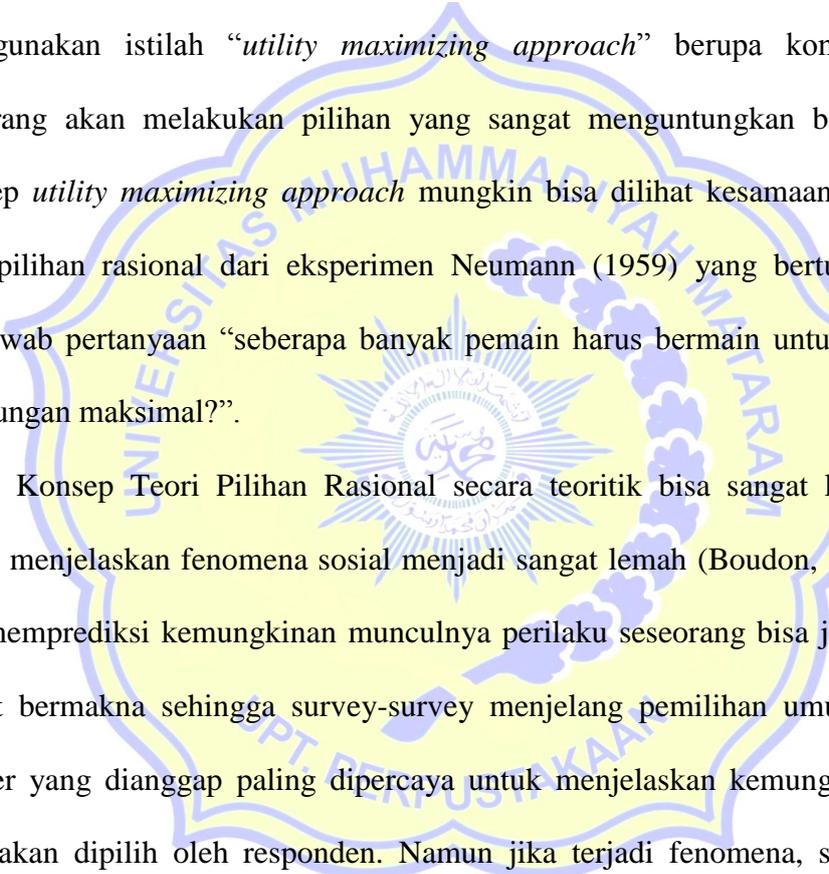
Ketiga, *faktor perbedaan ideologis*. Masing-masing kelompok kepentingan memiliki ideologi yang berbeda, yang membuat masing-masing kelompok kepentingan menafsirkan isu-isu sosial secara berbeda pula. Cara menafsirkan isu sosial ini pada akhirnya akan berpengaruh pada sikap dan perilaku anggota-anggota berbagai kelompok kepentingan tersebut.

Terakhir, *faktor kesetiaan terhadap kelompok dan solidaritas*. Keanggotaan dalam suatu kelompok kepentingan tertentu ikut membentuk identitas sosial seseorang. Status ini ikut menentukan bagaimana seseorang menafsirkan kepentingannya dan kepentingan orang lain.

Dalam pendekatan korporatis ini, Elit juga tidak dianggap sebagai aktor yang pasif, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kepentingan dan mengaplikasikan berbagai strategi untuk mengantisipasi strategi yang digunakan oleh aktor-aktor lain atau Muhammadiyah dalam kelompok-kelompok kepentingan lain. Salah satu strateginya adalah dengan menjalin hubungan saling keterikatan Elit dengan kelompok-kelompok kepentingan besar, di mana pada akhirnya dua pihak inilah yang mendominasi proses kebijakan sehingga memunculkan hasil yang membawa manfaat paling maksimal bagi kedua belah pihak entah muhammadiyah atau pun elit muhammadiyah. Kelompok-kelompok kepentingan yang lebih kecil berada di pinggiran dan pengaruh mereka relatif

dikontrol melalui pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang lebih besar dan memiliki relasi yang kuat dengan pihak negara.

2.4.2 Konsef Teori Rational Choice

Boudon (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata “rasional” dimana kata ini bermakna bahwa perilaku merupakan proses kognisi yang harus dapat dijelaskan. Selain itu teori ini juga dijelaskan menggunakan istilah “*utility maximizing approach*” berupa konsep bahwa seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Konsep *utility maximizing approach* mungkin bisa dilihat kesamaannya dengan teori pilihan rasional dari eksperimen Neumann (1959) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan “seberapa banyak pemain harus bermain untuk mendapat keuntungan maksimal?”.


Konsep Teori Pilihan Rasional secara teoritik bisa sangat kuat namun ketika menjelaskan fenomena sosial menjadi sangat lemah (Boudon, 2009). Pada saat memprediksi kemungkinan munculnya perilaku seseorang bisa jadi teori ini sangat bermakna sehingga survey-survey menjelang pemilihan umum menjadi sumber yang dianggap paling dipercaya untuk menjelaskan kemungkinan siapa yang akan dipilih oleh responden. Namun jika terjadi fenomena, sebagaimana ketidak-sesuaian hasil survey dalam contoh diawal maka teori ini sangat lemah dalam menjelaskan fenomena tersebut.

Namun demikian, hal ini tidak menghambat penggunaan teori ini dalam berbagai aplikasinya terutama dalam psikologi politik, psikologi konsumen, dan psikologi moral. Secara konseptual, teori ini masih merupakan teori yang baik

dalam memprediksi perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Kajian politik, terutama tentang perilaku pemilih masih sangat membutuhkan teori pilihan rasional dalam memprediksi perilaku pemilih, begitu juga psikologi konsumen yang membutuhkan prediksi bagaimana konsumen memilih produk tertentu, begitu juga psikologi moral yang membutuhkan teori ini untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan perilaku berdasarkan nilai moral tertentu.

Boudon (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki enam postulat, yaitu: (1) setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb., (2) perilaku dapat dipahami. Postulat pertama menunjukkan bahwa fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, diantaranya pilihan, sedangkan postulat kedua menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah rangkaian dari kejadian-kejadian yang dapat dipahami. Adapun postulat ketiga merupakan postulat yang mendasari kata rasional, yaitu (3) perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada dipikiran. Postulat keempat mendasarkan pada pernyataan (4) bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut. Sedangkan postulat kelima berkaitan erat dengan postulat sebelumnya, yaitu (5) penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakannya oleh individu yang mengambil keputusan (egoisme). Sedangkan postulat terakhir menyatakan bahwa (6) individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya.

Menurut penulis dari beberapa paparan teori pilihan rasional di atas peneliti lebih condong menggunakan teori pilihan rasional menurut Boudon (2009) yang

mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki enam postulat, yaitu: (1) setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dsb., (2) perilaku dapat dipahami. Postulat pertama menunjukkan bahwa fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, diantaranya pilihan, sedangkan postulat kedua menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah rangkaian dari kejadian-kejadian yang dapat dipahami. Adapun postulat ketiga merupakan postulat yang mendasari kata rasional, yaitu (3) perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada dipikiran. Postulat keempat mendasarkan pada pernyataan (4) bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut. Sedangkan postulat kelima berkaitan erat dengan postulat sebelumnya, yaitu (5) penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakannya oleh individu yang mengambil keputusan (egoisme). Sedangkan postulat terakhir menyatakan bahwa (6) individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya.

2.5 Konsef Civil Society

M. Dawam (1999) Secara harfiah, *civil society* sendiri adalah terjemahan dari istilah latin, *civilis societas*. Istilah ini pada awalnya digunakan oleh Cicero—seorang orator dan pujangga Roma yang hidup pada abad pertama sebelum Kristus. Menurut Cicero, *civil society* bisa disebut sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengakuan hidup. Konsep Cicero mencakup kondisi masyarakat yang memiliki budaya dan menganut norma-norma kesopanan tertentu.

Hatta (1986) Sejauh ini terdapat beberapa perkembangan penafsiran *civil society* dari berbagai pemikir sosial dan politik. Konsep *civil society* pertama kali dicetuskan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, yang lahir di Semenanjung Kalkidike di Trasia (Balkan) pada tahun 384 S.M, dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 S.M. Aristoteles menggunakan istilah *koinonia politike*, atau dalam bahasa Latin *societas civilis*, yang berarti masyarakat politik (*political society*).

Dalam buku Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, konsep *civil society* kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke. Menurut Hobbes, *civil society* yang identik dengan negara merupakan perwujudan dari kekuasaan absolut. *Civil society* hadir untuk meredam konflik agar tidak terjadi *chaos* dan tindakan anarki. *Civil society* berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi perilaku politik warga yang memiliki kekuasaan mutlak. Sedangkan menurut John Locke, *civil society* berfungsi untuk menjaga kebebasan warga dan melindungi hak-hak milik individu.

M.A.S Hikam dalam buku *Islam, Demokrasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, mengutip pendapat Ferguson yang mengatakan bahwa munculnya ekonomi pasar dapat melunturkan tanggung jawab publik terhadap sesama warga negara karena kecenderungan pemuasan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, *civil society* dapat menghalangi munculnya tindakan kesewenangan pemerintah. Dalam *civil society* itulah solidaritas bisa muncul yang diilhami oleh sikap saling menyayangi antar sesama warga.

Di dalam buku tersebut, konsep *civil society* mengalami perubahan pada paruh akhir abad ke 18. Menurut Thomas Paine, seorang aktivis liberal, perlu

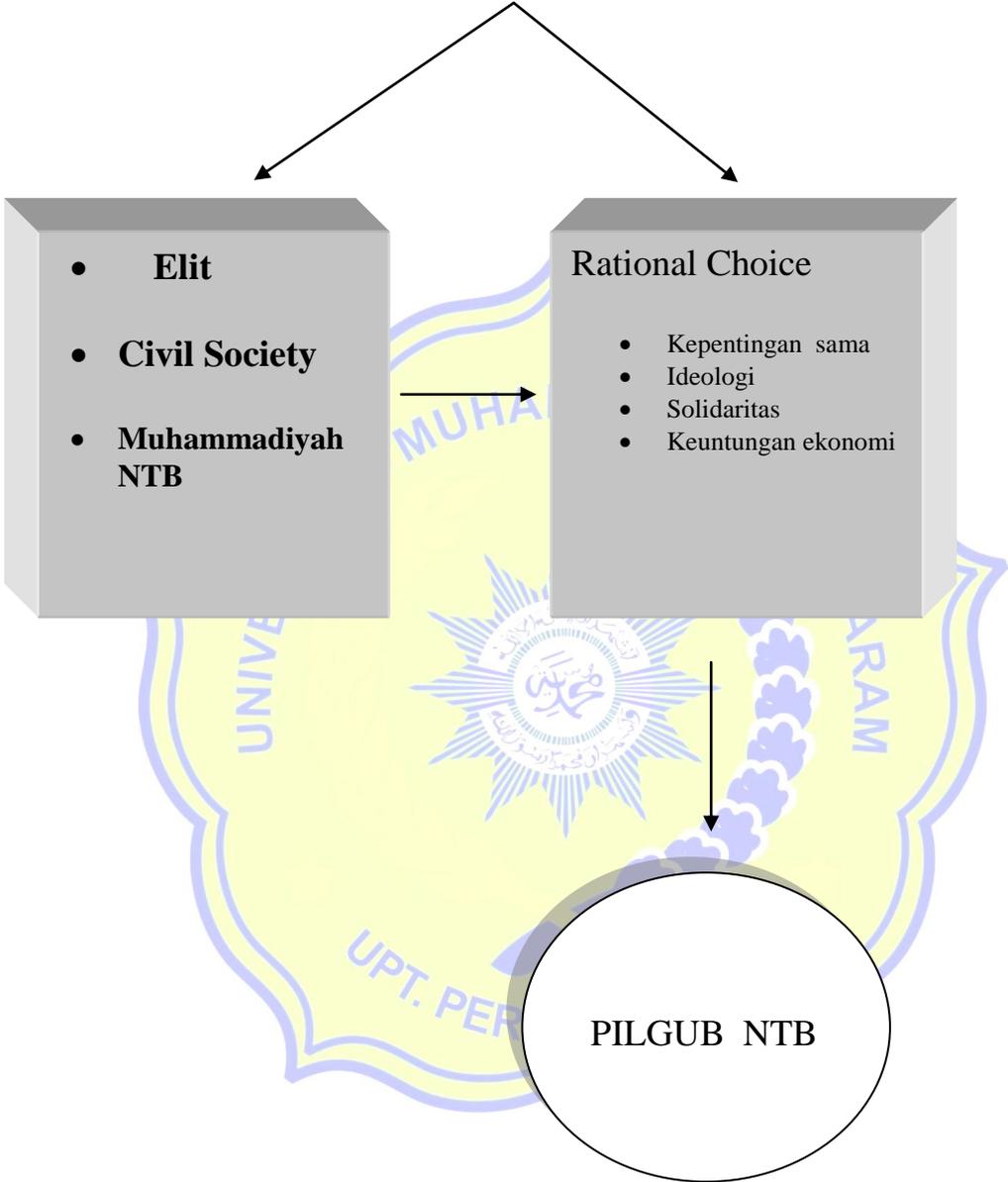
adanya pemisahan antara *civil society* dan negara. Peran negara harus dibatasi sekecil-kecilnya karena keberadaannya merupakan keniscayaan yang buruk (*necessary evil*) belaka. *Civil society* merupakan ruang dimana dapat mengembangkan kepribadiannya secara bebas dan memberikan peluang bagi pemuasan kepentingannya. Karena itu, *civil society* berperan terhadap kontrol negara.

2.6 Kerangka Pikir

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas islam terbesar di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan republik Indonesia. Organisasi massa yang bergerak di bidang dakwah islam serta sebagai agen perubahan sosial dengan melakukan modernisasi sosial serta pendidikan guna memberantas keterbelakangan umat islam. Sejarah panjang perjalanan Muhammadiyah ini menjadi lebih dewasa ditempa oleh waktu hingga memiliki berbagai sayap organisasi yang bergerak di berbagai bidang.

Adanya hierarki elit dalam Muhammadiyah yang terstruktur serta basis massa yang luas menjadikan elit sebagai penentu arah kebijakan, khususnya kebijakan terkait dukungan terhadap kader Muhammadiyah yang mencalonkan dalam Pemilihan Umum, baik kompetisi di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Perilaku Politik Elite Muhammadiyah Dalam Pilkada NTB 2018



Sumber : Dunlevy(2002), Boudon (2009)

2.7. Definisi Konseptual

1. Pengertian Perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga dengan pemerintah, dan interaksi antara kelompok individu dengan masyarakat. Dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.
2. Pengertian elite Istilah elite berasal dari bahasa Inggris *elite* yang juga berasal dari bahasa latin *eligere*, yang berarti memilih. Istilah elite digunakan pada abad ke-17 untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus, yang kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok social tinggi seperti kesatuan-kesatuan militer atau kalangan bangsawan.
3. Pengertian Rational Choice rational-choice adalah 'ketika dihadapkan pada beberapa alur tindakan, manusia biasanya akan memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut'. Kesimpulan itu dijabarkan secara lebih detil dalam premis-premis dasar rational-choice theory.
4. Pengertian *civil society* bisa disebut sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengakuan hidup. Konsep Cicero mencakup kondisi masyarakat yang memiliki budaya dan menganut norma-norma kesopanan tertentu.

2.8. Definisi Oprasioonal

1. Pada dasarnya Elit Kepentingan yang Sama dan mampu mengakomodasi kepentingany.

2. Ideologi
3. Solidaritas
4. Keuntungan ekonomi



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Prilaku Elite Politik Muhammadiyah Dalam Pilkada NTB (Studi Kasus PWM NTB) secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah NTB.

3.2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang merupakan lokasi Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PMW) ditempatkan di ibukota provinsi.

3.3. Sumber Data

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh Penulis dilapangan, melalui observasi, pertimbangan digunakan teknik ini adalah bahwa apa yang orang katakan seringkali berbeda dengan apa yang ia lakukan, dalam melakukan observasi tersebut, Penulis menggunakan alat perekam, jadi data ini kami peroleh dari Elit Muhammadiyah, Univeristas Muhammadiyah Matarm Nusa Tenggara Barat, dengan memberikan beberapa pertanyaan dan merekam pembicaraan yang kami lakukan.

Tabel 3.1
Sumber Data Primer

No	Nama Data	Sumber	Bentuk Data
1	Jumlah Elit Struktural Muhammadiyah NTB	Sekretaris PWM NTB	File
2	Prilaku Elit PWM NTB	Ketua dan anggota PWM NTB	Wawancara

Sumber : Pengurus Wilayah Muhammadiyah NTB

b. Data Sekunder

Penulis selain turun kelapangan juga melakukan telaah pustaka yakni mengumpulkan data dari buku, jurnal, koran dan sumber informasi lainnya yang erat kaitannya dengan Arah Elit Muhammadiyah dalam Pilkada Nusa Tenggara Barat 2018.

Tabel 3.2
Sumber Data Sekunder

No	Nama Data	Sumber	Bentuk Data

1	Peran organisasi muhammadiyah dalam Pilkada NTB	Surat kabar	PDF
2	Prilaku Elit Muhammadiyah Dalam Pilkada NTB	Surat Kabar	PDF

Sumber: [Http://Niars.wordpress.com](http://Niars.wordpress.com)

3.4. Resfonden Penelitian

Sesuai Dengan Permasalahan dan tujuan Penelitian yang ingin diketahui tentang, Prilaku Elite Politik Muhammadiyah Nusa tenggara Barat Dalam Pemilihan Kepala Daerah maka subyek penelitian di pilih berdasarkan identifikasi nama – nama yang telah di tentukan melalui persyaratan tertentu dengan pertimbangan – pertimbangan pengakuan dari pada Pengurus Wilayah Muhammadiyah Mataram, yang di maksud di uraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Keterangan
1	Ketua dan Wakil Ketua PWM NTB	12 Orang
2	Sekretaris Dan bendahara PWM NTB	4 Orang

Sumber : PWM NTB

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Burhan Bungin (2003: 42), menjelaskan Tehnik pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*”.

Suharsimi Arikunto (2002:136), berpendapat bahwa “teknik penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Wawancara

digunakan untuk mengungkapkan data tentang bentuk partisipasi orang tua siswa, berlangsungnya bentuk partisipasi, manfaat partisipasi orang tua siswa dan faktor yang mempengaruhi partisipasi orang tua siswa dalam pembelajaran.

2. Metode Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan komite kelas V, dan arsip guru/wali kelas mengenai pembelajaran dan kegiatan partisipasi orang tua siswa di SD Islam Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta.

3.6. Tehknik analisis Data

Analisis data merupakan kajian objektif dari hasil yang didapatkan di lapangan dan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan proses pengumpulan data secara terus menerus. Sebelum memasuki tahapan teknis dalam menganalisa data, perlu dijelaskan tentang triangulasi data, yaitu proses mengkombinasikan hasil yang didapatkan di lapangan pada saat melakukan penelitian dan digabung dengan kemampuan peneliti dalam mengkaji data yang berhasil didapatkan di lapangan secara objektif serta memakai teori-teori yang dianggap mampu menjadi pedoman dalam melakukan analisis terhadap permasalahan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*). Penulis membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara mengabstraksikan data - data empiris yang dikumpulkan dari lapangan. Kemudian mencari pola-pola yang terdapat dalam data tersebut. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis data dilaksanakan secara paralel pada saat proses pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah mencapai titik jenuh profil data dan telah menemukan pola aturan yang dicari. Jadi analisis data adalah proses menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Penelitian data kualitatif ada teknik-teknik dalam melakukan analisis meskipun tidak ada panduan baku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam teknik analisis data terdapat komponen-komponen yang selalu ada seperti pengumpulan data, kategori data, dan kesimpulan akhir.

Ketiga teknik inilah yang dipakai oleh Peneliti untuk menganalisa data tentang Arah Politik Elit Muhammadiyah dalam Pilkada 2018 studi kasus PWM NTB. Penelitian data sebagai komponen dalam teknik analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan yang penting karena berkaitan dengan fokus dalam suatu penelitian. Pada tahapan pengumpulan data alat bantu yang di perlukan berupa tape, recorder, kamera yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data dari hasil wawancara.

Pada tahapan wawancara Penulis harus mampu memilah data yang relevan dengan fokus penelitian dan menyederhanakan data yang dikumpulkan dengan cara mengikat konsep-konsep atau kata kunci sehingga memudahkan Penulis untuk menganalisis data. Pada tahapan selanjutnya adalah kesimpulan akhir dimana data yang telah dikumpulkan melalui tahapan wawancara dan penyederhanaan data telah diolah menjadi bentuk penelitian deskriptif kualitatif sehingga tidak perlu lagi ada penambahan data baru karena data yang diperlukan sudah cukup dan apabila ada penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redund-pdant*).